

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Arab Saudi atau dikenal juga dengan Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara yang berada di Kawasan Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 dan menganut sistem monarki absolut, di mana kekuasaan dipegang oleh keluarga Al-Saud, dari Dinasti Saud yang telah ada sejak abad ke-18. (Britannica, 2006) Arab Saudi adalah negara terbesar di Semenanjung Arab, dengan menempati sekitar empat perlima wilayah dengan luas lebih dari 2.000.000 km<sup>2</sup>. Arab Saudi berbatasan dengan Yordania, Irak, dan Kuwait di utara; oleh Teluk Persia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman di timur; oleh sebagian Oman ke tenggara; oleh Yaman di selatan dan barat daya; dan di Laut Merah dan Teluk Aqaba di barat. (Britannica, 2006)

Walau Arab Saudi menganut sistem monarki absolut, namun Arab Saudi tidak menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, Arab Saudi sangat terbuka dan banyak membangun hubungan internasional dengan negara-negara lain. Sejak didirikannya Arab Saudi, politik luar negeri Arab Saudi pada dasarnya selalu berfokus pada Kawasan Timur Tengah, termasuk hubungannya dengan negara-negara di kawasan tersebut. Hal ini karena aktivitas-aktivitas di kawasan Timur Tengah dapat berdampak secara langsung terhadap stabilitas dalam negeri Arab Saudi. Salah satu negara yang menjalin hubungan dan menjadi prioritas Arab Saudi adalah Turki. (Suma, 2019).

Arab Saudi dan Turki termasuk negara yang memiliki kekuatan regional yang kuat di kawasan Timur Tengah. Kedua negara telah memainkan peran yang signifikan di kawasan tersebut. Arab Saudi merupakan aktor yang sangat berpengaruh dalam politik Arab dan politik di dunia Muslim karena kemampuan finansial, posisi kepemimpinannya di Semenanjung Arab, dan pengaruhnya pada Gulf Cooperation Council (GCC), Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sementara itu, Turki telah memainkan peran aktif di Timur Tengah selama Perang Dingin dan setelahnya dan memiliki kapabilitas ekonomi dan militer yang kuat, sehingga menjadikan Turki sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan oleh Arab Saudi. (Ellithy, 2015).

Arab Saudi telah membangun hubungan diplomatik dengan Turki sejak 1932, terutama setelah berdirinya Arab Saudi. Hubungan antara kedua negara sangat tergantung pada situasi dan kondisi dan cara masing-masing negara mendekati dan dalam merespons situasi yang melibatkan atau berdampak terhadap kedua negara (Ellithy, 2015). Tidak dapat dipungkiri bahwa selama hubungan bilateral keduanya, Arab Saudi dan Turki sering mengalami dinamika masalah yang memengaruhi hubungan kedua negara. Pasang surut hubungan Saudi-Turki ini sebagian merupakan akibat dari ketidakstabilan politik Turki, termasuk beberapa kudeta militer di tahun 80an dan 90an. Hubungan keduanya cenderung membaik ketika partai-partai Islam atau sipil berkuasa dan memiliki hubungan budaya dan agama yang dekat dengan tetangga Muslim Turki. Hubungan antara kedua negara menemukan pijakan yang lebih kuat setelah Justice and Development Party atau umumnya dikenal sebagai AKP, memperoleh kekuasaan di Turki pada tahun 2003 dan terus membaik selama dekade ini. Berbeda dengan pemerintah sekuler yang telah memerintah Turki sejak 1923, Turki di

bawah AKP menempatkan prioritas tinggi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan tetangga Arab dan negara Islam. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan perubahan yang dihasilkan dalam keseimbangan kekuasaan di wilayah tersebut membawa hubungan Turki dan Arab Saudi semakin dekat, setelah keduanya keduanya memiliki keprihatinan yang sama tentang jatuhnya Irak ke tangan saingan mereka bersama. (Habibi, 2018).

Akan tetapi pemberontakan rakyat di berbagai negara Arab pada tahun 2011 atau lebih dikenal dengan Arab Spring membawa dampak negatif terhadap hubungan Arab Saudi dan Turki, dikarenakan kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu Arab Spring dan kepentingan mereka tidak selalu sama dalam semua kasus. Turki mendukung Arab Spring karena menganggap pemberontakan akan mengarah pada hubungan baru yang harmonis antara masyarakat Arab dan penguasa baru mereka dan sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan regional. Sementara itu, Arab Saudi menganggap pemberontakan akan menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan untuk waktu yang lama di kawasan Timur Tengah. Perbedaan antara pendekatan dan kepentingan kedua negara sangat jelas dalam serangkaian peristiwa yang terjadi di Mesir baik selama pemberontakan anti-Mubarak pada tahun 2011 atau perubahan politik pada Juli 2013. Hubungan keduanya semakin memburuk ketika Arab Saudi berhasil menggagalkan upaya Turki untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2014. (Ellithy, 2015).

Dinamika hubungan Arab Saudi dan Turki memang cukup kompleks. Hubungan kedua negara banyak mengalami pasang surut dan pro dan kontra dalam ideologi, perspektif, atau kepentingan dalam menghadapi isu-isu yang melibatkan atau

berdampak terhadap keduanya. Hubungan yang terjalin antara Arab Saudi dan Turki saat ini sering disebut sebagai "*frenemies*" atau *friends* dan *enemies* yang berarti teman sekaligus musuh atau rival. (Suma, 2019).

Namun, keadaan hubungan kedua negara menjadi semakin memburuk selama beberapa tahun terakhir. Selama tahun 2017-2020, kedua negara telah menunjukkan perspektif, sikap, dan kepentingan yang sering berlawanan, seperti dalam menyikapi krisis diplomatik Qatar dan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Ketegangan antar kedua negara masih belum mereda selama tahun 2019-2020, Arab Saudi telah beberapa kali mengecam tindakan Turki, seperti mengecam agresi Turki di timur laut Syria, serangan Turki-Iran di Iraq utara, keterlibatan Turki dalam perang di Libya, dan lain-lain. Otoritas Arab Saudi juga melakukan pemblokiran akses ke portal berita Turki, yaitu Anadolu Agency dan TRT Arabic, setelah pemberitaan negatif terhadap Kerajaan Keputusan tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan terbaru Riyadh terhadap Ankara. (Nordic Monitor, 2020). Selain itu, pada Juli 2020, kelompok pengusaha sektor swasta non-pemerintah menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk Turki sebagai tanggapan atas sikap 'permusuhan' pemerintah Turki terhadap pemerintah Arab Saudi. (Reuters, 2020). Beberapa fakta ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Arab Saudi terhadap Turki pada tahun 2014-2020 menunjukkan sikap yang cenderung konfrontatif, sehingga perlu dikaji lebih mendalam beberapa alasan yang mendasari sikap politik luar negeri Arab Saudi terhadap Turki tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka pertanyaan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini,

yaitu mengapa politik luar negeri Arab Saudi terhadap Turki pada tahun 2014-2020 menunjukkan sikap yang cenderung konfrontatif?

### **1.3. Kerangka Teori**

#### **1.3.1. Konsep Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam merespon fenomena disekitarnya. Istilah politik atau kebijakan luar negeri telah banyak dirumuskan oleh para ahli dalam beberapa cara. George Modelski memberikan definisi politik luar negeri sebagai *“sistem dari aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas politik untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan tindakan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menjelaskan cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara lain.”* Modelski menekankan aspek-aspek kebijakan yang mengarah pada perubahan perilaku negara yang ada sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Namun, politik luar negeri tidak hanya persoalan untuk mengubah, tetapi juga mencakup kelanjutan perilaku yang ada di berbagai waktu. Ini berkaitan dengan perubahan dan status quo sejauh kepentingan nasional suatu negara. (AS, 2018)

Kemudian menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (Hasanah, 2010), memberi definisi bahwa *“politik luar negeri adalah strategi atau arah atau tindakan yang direncanakan yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara vis a vis negara lain, ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang didefinisikan dalam istilah kepentingan nasional.”*

Hugh S. Gibson dalam bukunya *“The Road of Foreign Policy”* (AS, 2018) mendefinisikan politik luar negeri sebagai berikut:

*“Politik luar negeri adalah sebuah rencana komprehensif yang menyeluruh berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan seluruh dunia. Politik luar negeri ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan negara. Ini membutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa, kepentingan siapa, dan sejauh mana kepentingan dapat dicapai dengan kapabilitas yang dimiliki. Apapun yang kurang dari hal tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai politik luar negeri.”*

Secara umum politik luar negeri merupakan seperangkat formula yang melibatkan nilai, tindakan, arahan serta sasaran untuk menjaga, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam kancah dunia internasional. Politik luar negeri dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks domestik maupun internasional dan sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. (Yani, 2007). Para ahli atau akademisi memberikan definisi yang berbeda mengenai politik luar negeri. Meski demikian, disisi lain mereka menekankan bahwa politik luar negeri berkaitan dengan tindakan suatu negara terhadap negara lain.

William D. Coplin dalam bukunya “Introduction to International Politics: A Theoretical Overview” menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sifat politik luar negeri, yaitu: 1) keputusan yang bersifat umum; 2) keputusan yang bersifat administratif; dan 3) keputusan yang bersifat krisis. Politik luar negeri yang bersifat umum merupakan serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan bersifat langsung dan berkaitan dengan pernyataan-pernyataan umum serta rencana yang sifatnya

*contingency*. Keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh para birokrasi pemerintah yang lebih rendah dan menyangkut kondisi-kondisi spesifik yang dibatasi oleh ruang, lingkup, dan waktunya. Sementara itu, keputusan politik luar negeri yang bersifat krisis merupakan gabungan dari dua tipe sebelumnya. Keputusan bersifat krisis umumnya ditandai oleh kondisi-kondisi khusus yang terbatas oleh waktu, mengejutkan, memiliki konsekuensi jangka panjang dan mengancam kepentingan negara.

Adapun tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita nasional dan memenuhi kebutuhan vital suatu negara. Politik luar negeri suatu negara dirumuskan, dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan kepada negara lain dalam rangka mengontrol tindakan negara lain dan merupakan langkah nyata untuk mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional suatu negara.

Dengan demikian dalam kaitan terhadap politik luar negeri Arab Saudi yang konfrontatif terhadap Turki pada tahun 2014-2020, keputusan tersebut merupakan sebuah keputusan yang bersifat krisis karena tindakan Turki dinilai mengancam kepentingan Arab Saudi. Politik luar negeri konfrontatif tersebut dipengaruhi oleh kepentingan nasional Arab Saudi. Oleh karena itu, keputusan tersebut dirancang dan ditetapkan untuk mengontrol tindakan Turki agar Arab Saudi dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya.

### **1.3.2. Teori Kepentingan Nasional**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan teori kepentingan nasional dalam menjelaskan sikap Arab Saudi yang cenderung konfrontatif terhadap Turki tahun 2014-2020.

Kepentingan nasional merupakan salah satu aspek penting dan selalu menjadi topik utama dalam kajian politik luar negeri dan negara. Istilah "kepentingan nasional" telah digunakan oleh para negarawan dan sarjana sejak berdirinya negara-bangsa untuk menggambarkan aspirasi dan tujuan entitas berdaulat di arena internasional. Hans J. Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional bukan hanya sekadar teori atau konsep abstrak tetapi juga memegang peranan penting dalam proses nyata penyelenggaraan politik luar negeri. Kepentingan nasional dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan politik luar negeri tertentu. Kepentingan nasional selalu menjadi acuan bagi suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain atau dalam merespon fenomena yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, politik luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.

Salah satu pemikir awal daripada konsep kepentingan nasional adalah Niccolò Machiavelli, yang selanjutnya mengembangkan aliran realisme dan dianggap sebagai pendiri studi ilmu politik modern. Konsep kepentingan nasional tersebut diterangkan dalam bukunya yang berjudul "The Prince (Il Principe)" pada tahun 1513. Kepentingan nasional oleh Machiavelli dapat dipahami sebagai tujuan atau ambisi suatu negara di bidang ekonomi, militer, atau budaya. Dengan kata lain kepentingan nasional dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan suatu bangsa.

Menurut Hans J Morgenthau (Mas'ood, 1994) kepentingan nasional merupakan upaya suatu negara untuk mengejar kekuasaan atau kekuatan (*power*), yaitu kemampuan untuk mengontrol dan memengaruhi pandangan dan perilaku negara lain. Kepentingan nasional memiliki hubungan erat



dengan kelangsungan hidup (*survival*) suatu negara bangsa. Negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), rezim ekonomi politiknya (identitas politik), dan norma-norma, etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (identitas kulturalnya) dari ancaman negara-negara lain.

Kemudian konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein (1976: 247). Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal. Lebih lanjut Nuechterlein mengemukakan bahwa terdapat empat aspek kepentingan nasional yang tidak eksklusif satu sama lain. Keempat aspek tersebut antara lain adalah kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. (Nuechterlein, 1976).

- 1) Kepentingan pertahanan (*defense interest*): perlindungan negara-bangsa dan warganya dari ancaman kekerasan fisik yang ditujukan oleh negara lain, dan/atau ancaman yang diilhami dari luar terhadap sistem pemerintahannya.
- 2) Kepentingan ekonomi (*economic interest*): peningkatan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dalam hubungannya dengan negara-negara lain.
- 3) Kepentingan tatanan dunia (*world order interest*): pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa mungkin merasa aman, dan di mana warga negara dan perdagangannya dapat beroperasi dengan damai di luar perbatasannya.
- 4) Kepentingan ideologi (*Ideology interest*): perlindungan dan kelanjutan seperangkat nilai yang dimiliki oleh masyarakat suatu negara-bangsa dan diyakini sebagai kebaikan universal.

Demikian juga konsep kepentingan nasional yang diuraikan oleh Jack C. Plano dan Ray Olton. Plano dan Olton memberikan definisi kepentingan nasional sebagai:

*“Kepentingan nasional adalah tujuan fundamental dan determinan akhir yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang merupakan kebutuhan paling vital negara. Ini termasuk pertahanan diri, kemerdekaan, integritas teritorial, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.”*

Plano dan Olton mengartikan kepentingan nasional sebagai kepentingan vital suatu negara yang harus dipenuhi untuk mempertahankan eksistensinya. Kebutuhan vital negara menurut Plano meliputi; pertahanan diri (*self-prevention*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*). Pertahanan diri adalah kebutuhan suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari segala ancaman yang dapat merugikan negara. Kemerdekaan berarti negara bertindak secara mandiri atau independent sebagai bentuk kedaulatan. Keutuhan wilayah adalah kepentingan negara untuk melindungi keutuhan wilayah dan sumber daya dari segala ancaman yang merugikan. Keamanan militer, yaitu keamanan negara yang ditunjang dengan kekuatan militer dan keamanan dari ancaman kekuatan militer negara lain. Kesejahteraan ekonomi berarti kepentingan negara terkait dengan upayanya mengamankan sektor ekonominya agar terjaga kestabilannya, sehingga tercapai kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian menurut Plano dan Olton, setiap tindakan negara dalam bentuk politik luar negeri

didorong atas dasar kebutuhan vital sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi. (Arsyad, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggabungkan konsep kepentingan nasional tersebut dan menarik kesimpulan bahwa politik luar negeri konfrontatif Arab Saudi terhadap Turki pada tahun 2014-2020, dipengaruhi oleh kepentingan nasional Arab Saudi. Kepentingan nasional Arab Saudi mencakup kepentingan pertahanan, kepentingan ideologi, dan kepentingan ekonomi. Dalam kepentingan pertahanan Arab Saudi ingin menjaga dan melindungi negaranya dari ancaman terhadap sistem politik atau sistem pemerintahannya. Kemudian kepentingan ideologi, dalam hal ini Arab Saudi ingin melindungi ideologinya dari ancaman ideologi lain. Sementara itu kepentingan ekonomi Arab Saudi adalah untuk menjaga stabilitas sektor ekonominya.

Arab Saudi dan Turki telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1932. Akan tetapi, hubungan antar kedua negara terjalin tidak stabil dan sering mengalami ketegangan. Langkah Arab Saudi mengambil strategi politik luar negeri yang konfrontatif terhadap Turki dianggap sebagai sebuah langkah untuk menjaga dan melindungi tujuan atau kepentingan nasional negaranya dari ancaman Turki. Arab Saudi menganggap bahwa Turki telah banyak menjalankan politik luar negeri yang sering bertentangan dengan kepentingan negaranya. Beberapa kebijakan Turki yang dianggap mengancam kepentingan Arab Saudi diantaranya adalah, dukungan Turki terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, dan dukungan Turki terhadap Qatar, dan campur tangan Turki dalam kasus Jamal Khashoggi. Kesemua hal itu berimplikasi mengancam keamanan, ideologi, dan ekonomi

Arab Saudi. Oleh karena itu, Arab Saudi pun mengambil sikap politik luar negeri yang konfrontatif terhadap Turki dalam upayanya mengamankan kepentingan nasionalnya.

#### **1.4. Hipotesa**

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diambil hipotesis bahwa politik luar negeri Arab Saudi yang cenderung konfrontatif terhadap Turki pada tahun 2014-2020 disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya sebagai berikut.

1. Arab Saudi memiliki kepentingan pertahanan dan ideologi terkait kebijakan Turki dalam mendukung Ikhwanul Muslimin dan dukungan Turki terhadap Qatar pada krisis diplomatik Qatar.
2. Arab Saudi memiliki kepentingan ekonomi terkait kasus Jamal Khashoggi. Perselisihan Arab Saudi dan Turki dan investigasi pemerintah Turki terhadap kasus Jamal Khashoggi, dinilai berdampak mengancam kepentingan ekonomi Arab Saudi.

#### **1.5. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik kata-kata dalam bentuk tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016). Penelitian kualitatif adalah bentuk kegiatan sosial yang menekankan pada cara orang menafsirkan dan memaknai pengalamannya untuk memahami realitas sosial individu. Penelitian ini bersifat eksploratif dan berusaha untuk menjelaskan 'bagaimana' dan 'mengapa' fenomena sosial atau program, beroperasi seperti yang dilakukannya dalam konteks

tertentu. Pada dasarnya, penelitian kualitatif tidak melibatkan analisis statistik atau prosedur kuantitatif lain dalam pengukuran variabelnya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menafsirkan dengan kompleks tentang masalah atau fenomena secara sistematis dari sudut pandang individu atau populasi yang diteliti, dan untuk menghasilkan konsep dan teori baru. (Mohajan, 2018).

Sementara itu, studi pustaka merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang relevan terhadap topik yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, koran, penelitian ilmiah, laporan, internet, atau sumber-sumber lainnya sebagai bahan penulisan penelitian. (Mirzaqon & Purwoko, 2018).

### **1.6. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dibuat untuk memudahkan penulis berfokus pada inti atau topik permasalahan yang telah disebutkan pada bagian hipotesis. Adapun jangkauan penelitian yang akan dibahas adalah kebijakan luar negeri Arab Saudi pada tahun 2014 sampai dengan 2020.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

**BAB I**, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II**, pada bab ini akan menjelaskan tentang arah politik luar negeri Arab Saudi.

**BAB III**, merupakan bab yang membahas tentang dinamika hubungan bilateral Arab Saudi dan Turki.

**BAB IV**, bab ini merupakan bab pembuktian hipotesa, yaitu tentang faktor-faktor yang memengaruhi politik luar negeri Arab Saudi yang cenderung konfrontatif terhadap Turki.

**BAB V**, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan penutup.